

Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik Batang Tarandam di Masa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988

Anggy Syafitra^{1(*)}, Etni Hardi²

^{1,2}Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

*Anggysyafitra6@gmail.com

Abstract

Azwar Anas's strategy (1977-1988) in leading and building of West Sumatera province in the New Order Era. The central problem is Azwar Anas's program in build the trust, pride, and self-esteem of west Sumatera people who have been devastated by PRRI trauma. This study is based on the state of West Sumatera Province in the 1960s where there was agitation and people felt trauma from the event. The purpose of this study is to describe the condition of West Sumatera after PRRI, Governor Azwar Anas's strategy to build and restore the pride and self-esteem of West Sumatra people. This thesis uses qualitative research methods, a type of historical research. This research method uses critical historical methods performed through heuristic stages, source criticism, interpretation, and historiography. From the findings of the author in order to evoke the spirit and self-esteem of West Sumatera people that fell after the agitation, Azwar Anas devised the arches of west Sumatra development. Azwar Anas also reorganized the local government by appointing three assistants of the Governor and jorong as a village. The development village in West Sumatra is carried out in an integrated way with the gotong royong system where community certainty is needed. West Sumatra being the implementer of MTQ National XIII is a pride for the community, and the annual event is very important for minangkabau culture namely Cultural Week. The peak condition of West Sumatera gained pride and self-esteem is to be the only province outside java island that received the best provincial award in the implementation of development by receiving the Charter of Parasamya Purnakarya Nugraha, it is the official moment of the definitive end of the process of pacification of the people of West Sumatra post-PRRI and the opening of a new era for West Sumatra Province to start a bright future.

Keywords: PRRI, Mambangkik batang tarandam, leader, policy.

Abstrak

Strategi Azwar Anas (1977-1988) dalam memimpin dan membangun daerah Provinsi Sumatera Barat di Era Orde Baru. Sentral permasalahannya adalah program Azwar Anas dalam membangun kepercayaan, kebanggaan, dan harga diri masyarakat Sumatera Barat yang luluh lantak akibat trauma PRRI. Kajian ini dilatar belakangi oleh keadaan Provinsi Sumatera Barat tahun 1960-an dimana terjadi pergolakan dan masyarakat merasakan trauma akibat peristiwa tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang kondisi Sumatera Barat setelah PRRI, strategi Gubernur Azwar Anas membangun dan mengembalikan harga diri serta kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Skripsi ini memakai metode penelitian kualitatif, jenis penelitian sejarah. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang dilakukan melalui tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Dari hasil temuan penulis dalam rangka membangkitkan semangat dan harga diri masyarakat Sumatera Barat yang jatuh setelah pergolakan, Azwar

Anas menyusun pola dasar pembangunan Sumatera Barat. Azwar Anas melakukan Reorganisasi pemerintahan daerah dengan mengangkat tiga pembantu Gubernur dan jorong dijadikan desa. Pembangunan desa di Sumatera Barat dilakukan dengan cara terpadu dengan sistem gotong royong yang mana partisipasi masyarakat dibutuhkan. Sumatera Barat menjadi pelaksana MTQ Nasional XIII merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat, dan dibuatnya acara tahunan yang sangat penting bagi kultural Minangkabau yaitu Pekan Budaya. Kondisi puncak Sumatera Barat mendapatkan kebanggaan dan Harga diri yang terangkatkan ialah menjadi satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang menerima penghargaan provinsi terbaik dalam pelaksanaan pembangunan dengan menerima Piagam Parasamya Purnakarya Nugraha, hal tersebut merupakan moment resmi berakhirnya secara definitif proses pasifikasi masyarakat Sumatera Barat pasca-PRRI dan terbukanya era baru bagi Provinsi Sumatera Barat untuk memulai masa depan yang cerah.

Kata kunci: PRRI, Mambangkik batang tarandam, pemimpin, kebijakan.

PENDAHULUAN

Sumatera Barat merupakan provinsi yang pernah menjadi basis dari sebuah pemberontakan yaitu PRRI atau dikenal Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tahun 1958 sampai 1961. Peristiwa PRRI 1958-1961 telah memporak-porandakan kehidupan sosial politik, ekonomi dan budaya daerah dan telah menimbulkan goncangan kultural dengan memukul kebanggaan dan rasa percaya diri orang Minangkabau yang telah tumbuh subur dalam waktu sebelumnya (Mestika Zed, 1998:157). Setelah Pemerintah Pusat menumpas pemberontakan PRRI, secara langsung telah menghantam perasaan rasa percaya diri dan kebanggaan yang dimiliki selama ini. Kekalahan yang diderita membuat masyarakat Minangkabau merasa malu, terhina dan tertekan karena kalah. Hal tersebut Menguburkan Keberadaan orang Minangkabau secara umum. Seperti sebagian besar masyarakat menyembunyikan identitasnya sebagai orang minang (Mestika Zed, 1998:160-161).

Berbagai upaya untuk mengembalikan harga diri dan kebanggaan masyarakat Minangkabau telah dilakukan oleh tokoh-tokoh minang baik yang berada di kampung maupun yang berada diperantauan. Seperti adanya pertemuan informal komunitas masyarakat Minang di Jakarta yang berdiskusi serius tentang situasi di Sumatera Barat yang porak poranda pasca PRRI. Selain itu masyarakat Minang yang berada diperantauan yang terpanggil hatinya untuk membangun kembali Sumatera Barat. (Abrar Yusra, 2011:98). Setelah PRRI berakhir Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa yang menjabat menjadi Gubernur Sumatera Barat saat itu mulai melakukan normalisasi di daerah Sumatera Barat. Strategi yang dilakukan Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa untuk menormalisasikan Provinsi Sumatera Barat. beberapa hal yang dilakukannya seperti membuka kembali sekolah dan kampus, memanggil kembali pegawai untuk bekerja, dan merangkul para Tungku Tigo Sajarangan. Bahkan Kantor Gubernur Sumatera Barat yang atapnya bagonjong merupakan salah satu karya pemerintahan Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa (Hasril Chaniago, 1998:278).

Pada masa orde baru atau pemerintahan soeharto, masyarakat Sumatera Barat mulai merehabilitas diri. Pada saat itu Sumatera Barat dipimpin seorang Gubernur Harun Zain (1966-1977) yang memerintah dengan motto: *Mambangkik batang tarandam*. Pada saat itu masyarakat Minangkabau dan tokoh-tokohnya berupaya mengembalikan harga diri dan

martabat yang dianggap sebelumnya sempat terbenam lumpur sejarah. Setelah tahun 1977 Harun Zain digantikan Oleh Azwar Anas yang menjadi Gubernur Sumatera Barat dari tahun 1977-1988. Banyak yang percaya bahwasanya gong kebangkitan Sumatera barat dicanangkan oleh Harun Zain (1966-1977) dan berkembang mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Gubernur Azwar Anas. (Abrar Yusrra, 2011:301)

Pada masa pemerintahan Azwar Anas pada saat Pelita III Sumatera Barat ditetapkan sebagai penerima anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha yang menjadi sebuah kebanggaan, sebab Sumatera barat adalah provinsi satu-satunya di luar Jawa yang pernah memenangkannya. Pemahkotaan Sumatera Barat dengan hadiah kenegaraan Parasamya merupakan momen resmi berakhirnya secara definitif proses pasifikasi masyarakat Sumatera Barat pasca PRRI. Pulihnya masyarakat dari luka-luka perang dan pada saat yang sama merupakan momen terbukanya era baru ke masa depan yang cerah. (Abrar Yusra, 2011:309)

Kajian terdahulu dalam penelitian penulis ialah Skripsi oleh Arfan Ari Shandy,2008. Dengan judul Harun Zain: *Strategi Mambangkik Batang Tarandam Dalam Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat*. Dalam Skripsi ini mengkaji tokoh intelektual, pemimpin Sumatera Barat dan Minangkau di Era Orde Baru, yaitu Harun Zain sebagai sentral Permasalahan. Skripsi ini di latar belakang Harun Zain menjadi gubernur Sumatera Barat saat daerah ini mengalami pergolakan dan diliputi rasa trauma mendalam. Keterkaitan skripsi tersebut dengan peneltian penulis karena sama-sama mempunyai objek kajian yang sama yang itu kepemimpinan,akan tetapi tokohnya berbeda.

Beberapa hal yang dilakukan oleh Gubernur Azwar Anas dimasa kepemimpinannya membangun dan memimpin Sumatera Barat tahun 1977-1988 yang penting untuk diteliti ialah: pertama, menyusun pola dasar pembangunan daerah Sumatera Barat. Kedua,melakukan reorganisasi pemerintahan daerah. Ketiga, dari Abri Masuk Desa hingga Manunggal Sakato. Keempat, pembangunan Sosial-Budaya.

Fokus penelitian ini ialah mengkaji cara dan strategi Azwar Anas dalam membangun dan memimpin Sumatera Barat tahun 1977-1988, yang dapat mempengaruhi kehidupan dan mengangkat kembali harga diri dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan pemikiran terhadap daerah Sumatera Barat setelah terjadinya peristiwa PRRI. menambah wawasan tentang cara pemerintah daerah Sumatera Barat membangun kembali daerahnya setelah terjadi traumatik akibat peristiwa PRRI. Sehingga bisa menjadi referensi dan sumber informasi bagi masyarakat.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang menggunakan langkah penulisan sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menganalisis dan menguji secara kritis peninggalan masa lalu atau bisa dibilang merekontruksi suatu peristiwa masa lalu. Menurut *Louis Gottschalk* ada empat tahap yang harus dijalani untuk merekontruksi suatu peristiwa sejarah yakni mengumpulkan sumber, kritik sumber, interprestasi dan akhirnya penulisan (Louis Goottschalk, 1986:36).

Heuristik

Dalam penelitian ini pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku terkait PRRI, Serta segala buku yang berhubungan dengan Sumatera Barat Tahun 1961-1998 dan Data yang berhubungan dengan kepemimpinan Gubernur Azwar Anas. Dan juga mencari dari dokumen-dokumen dilakukan dengan mempelajari arsip-arsip yang berkaitan dengan Arsip Nasional yang banyak menampilkan bukti dari Mambangkin batang tarandam paska PRRI.

Kritik Sumber

Dalam penelitian mengenai “Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik Batang Tarandam dimasa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988”. Penulis melakukan perbandingan dari berbagai sumber yang berhasil didapat dan mencari kesesuaian dari sumber-sumber yang ada. Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui keabsahan sumber-sumber yang ada tersebut. Untuk itu, perlu membandingkan sumber-sumber yang ada, yaitu antara sumber yang satu dengan sumber lainnya. Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui kebenaran sumber-sumber yang ada tersebut. Seperti Arsip, Buku, Koran, Wawancara dan dokumen yang bisa membantu penelitian ini.

Interpretasi

Tahap ini merupakan penafsiran dari peristiwa sejarah. Setelah melakukan kritik sumber, fakta-fakta yang di dapatkan dari arsip, buku, Koran, dan dokumen lainnya dihubungkan satu sama lain sehingga menghasilkan suatu peristiwa sejarah. Dokumen-dokumen yang diperoleh dianalisa dan dirangkai dalam hal sebab akibat dan dikelompokkan berdasarkan bab, dan melalui tahap inilah data yang di interpretasi dapat di siapakan kedalam bentuk ilmiah.

Historiografi

Penulisan sejarah atau Historiografi merupakan akhir dari tahap penulisan penelitian sejarah. Pada penulisan ini terdapat fakta-fakta yang telah ditemukan dan selanjutnya dideskripsikan melalui penulisan yang sistematis. Dalam tahap ini penulisan yang dilakukan akan di deskripsikan secara jelas mengenai masalah yang akan di teliti. Dalam hal penulisan sejarah juga di lakukan dalam tahap historiografi yang hasil akhirnya menjadi skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Sumatera Barat Pasca Peristiwa PRRI

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah administratif setingkat provinsi di Indonesia yang teritorialnya sama dengan daerah budaya. Daerah budaya yang dimaksud adalah Minangkabau. Penduduk Sumatera Barat mayoritasnya adalah masyarakat etnis Minangkabau. Berbasis kaum di nagari-nagari, Masyarakat Minang dikenal dengan masyarakat yang memiliki perbedaan karakteristik dengan masyarakat yang mempunyai suku dari daerah lain. Karakteristik tersebut ialah:Memakai sistem kekerabatan Matrilineal, yang mana memakai garis darah ibu.

1. Masyarakat minang memegang teguh nilai-nilai agama dan adat, sesuai filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (adat barsendi syarak, syarak bersendi

Kitabullah), artinya syarak mangato, adat mamakai (agama menggariskan, adat menjalankan)

2. Kehidupan sehari-hari masyarakat Minang bersifat egaliter (*duduk samo randah, tagak samo tinggi* (duduk sama rendah, tegak sama tinggi)) dan demokratis.
3. Memiliki kebudayaan yang suka bermigrasi ke daerah lain atau disebut dengan Merantau. Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau dikenal sebuah istilah *Tigo Tungku Sajarangan, tali tigo sapilin*, yang merupakan kepemimpinan tradisional Minangkabau.

Masyarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat yang egaliter. Maksudnya, sulit memerintah masyarakatnya karena keunikan dan sikap masyarakatnya yang kritis. Daerah Sumatera Barat merupakan daerah berat, artinya sulit memerintah masyarakatnya. Orang sangat kritis, kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai atau tidak mereka sukai, mereka akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak disukai tersebut dan kalau perlu sampai melawan pakai angkat senjata, seperti yang pernah terjadi di masa sebelum kemerdekaan pada perang padre, perang batipuh, perang Kamang, dan lain-lain. Setelah Indonesia merdeka, sikap egaliter masyarakat Sumatera Barat tidak pernah berubah. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang terjadinya Peristiwa PRRI. (Abrar Yusra, 2011:222)

Setelah perlawanan selama tiga tahun, akhirnya pemberontakan PRRI berakhir dengan ditumpasnya PRRI dengan cara militer oleh pusat. Berakhirnya peristiwa PRRI belumlah mengakhiri beban masyarakat Sumatera Barat, karena masyarakat Sumatera Barat paska PRRI mendapatkan tekanan hidup yang cukup berat. Bisa dibilang, berakhirnya PRRI merupakan zaman darurat bagi Sumatera Barat, karena penumpasan PRRI melalui Operasi Militer yang dilakukan pemerintah pusat telah memporak-porandakan Sumatera Barat dalam segala aspek, seperti sosial politik, ekonomi, dan budaya, (Mestika Zed, 1998:157).

Dalam aspek politik Peristiwa PRRI menimbulkan trauma yang dalam bagi masyarakat Sumatera Barat terutama eks PRRI. Hal tersebut di manfaatkan oleh PKI untuk mengembangkan pengaruhnya di Sumatera Barat, dengan cara memberikan tekanan terhadap masyarakat dan eks PRRI yang membuat banyaknya masyarakat Sumatera Barat yang bergabung dengan PKI. Dampak Perekonomian masyarakat dan daerah Sumatera Barat paska PRRI bisa dibilang memasuki fase yang cukup parah, karena selama peristiwa PRRI roda perekonomian di Sumatera Barat nyaris macet.

Penumpasan tersebut juga menimbulkan trauma yang dalam bagi Masyarakat Sumatera Barat terutama Eks PRRI. Karena Masyarakat yang terlibat PRRI diberikan amnesti oleh pemerintah pusat melalui Keppres No. 332 Tahun 1961. Menurut Nurila:

“Waktu selesai perang saudara atau PRRI, suami saya menyerahkan diri karena Pak Husein menyerah, karena ada berita amnesti oleh pemerintah pusat. Jadi suami saya ikut juga, suami saya di tahan selama tiga hari kalau tidak salah. Tetapi petinggi-petinggi PRRI seperti Pak Husein di bawa ke Jawa.” (Wawancara, 12 Oktober 2020)

Peristiwa PRRI menimbulkan guncangan kultural bagi masyarakat Sumatera Barat yang membuat kebanggaan dan rasa percaya diri orang Sumatera Barat yang dalam kurun waktu sebelumnya tumbuh subur. Karena banyaknya tokoh-tokoh Sumatera Barat yang menjadi eksponen pergerakan nasional, sebut saja Tan Malaka, Sultan Sjahrir, Mohammad

Yamin, Abdul Muis, Agus Salim dan masih banyak yang lainnya, yang sangat berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Pertengahan Abad 20 pun, prestasi masyarakat Sumatera Barat dalam intelektual Nasional sangat menonjol karena “lebih dari 3 persen elite nasional berasal dari Sumatera Barat, 12 persen menteri-menteri kabinet pada daswarsa pertama kemerdekaan Indonesia juga berasal dari Sumatera Barat. Dan 9 dari 15 penulis utama Balai Pustaka merupakan putra Sumatera Barat. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kebanggaan karena memegang posisi istimewa dalam Nasioanl. Karena tampil dan berperan penting bagi nasional. (Mestika Zed, 1998:159). Peran Syafrudin Prawiranegara dan masyarakat Sumatera Barat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk PDRI, sehingga Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaannya.

Akan tetapi kebanggaan dan rasa percaya diri orang Sumatera Barat yang dalam kurun waktu sebelumnya tumbuh subur tersebut hilang karena operasi militer yang dilakukan oleh pusat. Hal tersebut membuat kebanggaan dan rasa percaya diri tersebut menjadi rasa malu dan terhina. Menurut Taufik Abdullah:

“Sumatera Barat sewaktu PRRI luar biasa penghinaannya. Saya bisa mengatakan begini karena saya melihat supir yang sangat takut tentara, saya pergi ke kampung saya nasehat yang diberikan kepada saya ialah tertib dan sopan kepada tentara, luar biasa penghinaan bagi Sumatera Barat saat itu. Bahkan bahasa minang di tulis dikoran sudah di campuri bahasa jawa. Jadi ada krisis keminangan dari sudut kebudayaan”. (Minang Diaspora Network, 11 September 2020)

Karena kekalahan yang diderita PRRI menimbulkan kesengsaraan terhadap rakyat Sumatera Barat dan sesudah itu mendapat tekanan dan terror dari tentara yang merupakan oknum-oknum PKI. Hal tersebut membuat masyarakat Sumatera Barat mengalami penderitaan dan tekanan bathin, yang akhirnya banyak masyarakat Sumatera Barat yang melarikan diri ke rantau, dan mendorong terjadinya eksodus besar-besaran atau bisa dibilang terjadinya arus merantau dalam jumlah besar. Merantau memang tradisi lama yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat Minang atau Sumatera Barat, akan tetapi merantaunya masyarakat Minang tersebut pasca PRRI merupakan akibat langsung dari pemberontakan PRRI. Menurut Mochtar Naim: (Majalah Tempo, :12 Juli 1986.)

“Masyarakat Sumatera Barat setelah PRRI ada yang tidak bisa bangki-bangkit lagi. Apatis, tidak mau ngomong, dan masa bodoh. Karena orang Minang tidak suka kalah. Pedih betul menerima kekalahan tersebut”.

Pertistiwa PRRI menyebabkan terjadinya krisis identitas karena hal tersebut menguncang psikologis masyarakat Sumatera Barat. Penumpasan tersebut juga menimbulkan trauma yang dalam bagi Masyarakat Sumatera Barat.

Sebagai langkah untuk normalisasi daerah Sumatera Barat setelah PRRI maka Gubernur Sumatera Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa (1958-1965) mempunyai tugas pokok mengaktifkan dan membentuk Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan melakukan Pasifikasi Paska-PRRI. Strategi yang dilakukan Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa untuk menormalisasikan Provinsi Sumatera Barat adalah merangkul para Tungku Tigo Sajarangan, dan memanggil para pegawai agar kembali bertugas untuk mengisi pos-pos atau jawatan yang kosong karena disebabkan oleh peristiwa PRRI. Kaharoeddin Dt. Rangkayo

Basa juga membuka kembali sekolah-sekolah dan kampus untuk siswa dan mahasiswa agar bisa belajar kembali dan mulai mengaktifkan kegiatan pertanian dan perdagangan rakyat yang mengalami gangguan akibat peristiwa PRRI. (Hasril Chaniago, 1998:278).

Awal pemerintahan Gubernur Harun Zain (1966-1977) merupakan momentum untuk bangkit karena iklim psikologis yang kondusif untuk menghadapi masa depan dan merupakan awal terbukanya lembaran baru untuk daerah Sumatera Barat yang telah Porak-poranda akibat Peristiwa PRRI. Hal tersebut didasari karena Kekalahan PRRI(1958-1961) (Abrar Yusra, 2011:224). Harun Zain mencanangkan startegi harga diri dalam memulihkan kehidupan masyarakat pasca-PRRI(pasifikasi) dan pasca-G30S/PKI. Prioritas kebijakan Harun Zain adalah mengangkat kembali kehidupan rakyat Sumatera Barat. Berakhirnya pemerintahan Nasakom dan ditumpasnya organisasi-organisasi komunis menciptakan kondisi politik yang kondusif untuk memulai pembangunan oleh pemerintah Orde Baru. Bahkan Harun Zain melakukan revitalisasi mental dan psikologis masyarakat Sumatera Barat dengan menggandeng LKAAM sebagai mitra pengembangan mental dan harga diri masyarakat Sumatera Barat. Harun Zai juga membantu melakukan permasalahan yang di hadapai oleh pegawai eks-PRRI dan menyelesaikan permasalahan Tahanan G.30 S/PKI Golongan c. (Arfan Ari Shandy,2008.)

Periode Kepemimpinan Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatera Barat

Pada tahun 1966 sampai 1977 Harun zain dipercaya menjabat sebagai gubernur sumatera Barat (1966-1977) ia telah membangun daerah ini dari sisa-sisa pergolakan PRRI. Ada tiga titik utama keberhasilan Harun zain:

1. Melakukan rehabilitas fisik daerah serta mengembalikan kepercayaan diri masyarakat
2. Meletakkan kerangka landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi
3. Menciptakan stabilitas nasional yang mantap di daerah sehingga berhasil memulihkan kepercayaan pusat karena bekerja dengan sungguh-sungguh.

Setelah Harun Zain menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat muncul banyak pertanyaan siapa yang pantas menggantikan posisi Harun Zain. Dalam pemilihan Gubernur pada masa Orde baru harus mengikuti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, kepala daerah seperti Gubernur, Wali kota, dan bupati dipilih oleh DPRD, dan dimulai dari pencalonan dari fraksi dan hanya ada satu calon defenitif yang ditentukan lalu diangkat presiden. Tidak seperti sekarang yang melalui pemilu dalam menetapkan siapa kepada daerah selanjutnya. Calon gubernur Sumatera Barat di masa Orde baru harus memiliki beberapa Kriteria dasar. Pertama, punya perhatian kepada masyarakat serta daerah Sumatera Barat. Kedua, Memiliki kemampuan untuk membangun. Ketiga, sangat dipercaya dan di terima Masyarakat Sumatera Barat. Di Sumatera Barat saat itu hanya mempunyai tiga Fraksi di DPRD yaitu Fraksi Karya Pembangunan Fraksi PPP, Fraksi ABRI. (Abrar Yusra, 2011:213)

Pada saat itu ada beberapa orang yang cocok dengan kriteria dasar untuk memimpin Sumatera Barat, yaitu Azwar Anas, Januar Muin yang sama-sama dari Golkar, dan Anas, S.H. yang di calonkan oleh Fraksi PPP. Pada tahun 1977 datanglah hari dimana proses pencalonan dan pemilihan Gubernur Sumatera Barat. setelah diadakannya proses pencalonan

dari fraksi-fraksi lalu setelah itu maka diadakannya pemilihan dengan cara sidang pleno yang waktu itu beranggotakan 40 orang. Hasil dari sidang pleno tersebut ialah kemenangan telak bagi Azwar Anas. maka pada tanggal 18 Oktober 1977 Azwar Anas dilantik menjadi Gubernur Sumatera Barat periode 1977-1982 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Pidato pertama Azwar Anas setelah menjadi Gubernur ialah “Jika tindakan saya benar, ikutilah saya; jika salah ingatkanlah.” Yang dikutip dari pidato Sayidina Abu Bakar Siddiq saat dilantik menjadi kalifah. Dan pada periode 1982-1987 Azwar Anas menjabat lagi menjadi Gubernur Sumatera Barat. (Keputusan Presiden RI Nomor 122/M. 1977)

Program Azwar Anas dalam Memimpin dan Membangun Sumatera Barat

Langkah awal Azwar Anas dalam membangun Sumatera Barat ialah, membangun kesadaran diri dari bawahannya untuk bekerja dengan serius dengan prestasi yang baik. Kebijakan yang dilakukan untuk memotivasi hal tersebut ialah: Pertama, Semua Pegawai Negeri Sipil harus memakai pakaian seragam. Kedua, Memakai mesin absensi dan menerapkan Latihan Dasar Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Menerapkan Rapat Koordinator yang merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk evaluasi terhadap kebijakan yang diterapkan. Rakor ini dilaksanakan setiap hari selasa, tepatnya minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Dalam memimpin dan membangun Sumatera Barat ada beberapa program yang dilakukan Azwar Anas, yaitu:

a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Sapta Karya Pembangunan Daerah)

Dalam menyusun pola dasar pembangunan Sumatera Barat, Azwar Anas melakukan rangkaian diskusi dengan mengajak dosen perguruan tinggi Unand, IKIP, dan IAIN Imam Bonjol di Sumatera Barat. Beliau mengundang kepemimpinan formal dan informal di Sumatera Barat. Dengan bantuan Drs. Hendra Esmara dengan staf dari lembaga penelitian ekonomi regional Fakultas Ekonomi Unand. Diskusi tersebut akhirnya berhasil melahirkan strategi pembangunan daerah yang disebut Sapta Karya Pembangunan Daerah, yang terdiri dari: Melaksanakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan bagi seluruh rakyat;

- 1) Mengusahakan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
- 2) Memelihara dan meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis di daerah;
- 3) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pembinaan moral dan akhlak;
- 4) Memajukan kecerdasan bangsa;
- 5) Membina keharmonisan taat kehidupan berdasarkan alur dan patut;
- 6) Meningkatkan partisipasi para ninik mamak, alim ulama, candik pandai, wanita, generasi muda, dan seluruh lapisan masyarakat di segala bidang pembangunan.

Draf resmi Sapta Karya Pembangunan Daerah Sumatera Barat itu diserahkan kepada Gubernur Azwar Anas tanggal 17 Agustus 1978, dan pengimplementasiannya menjadi program tahunan disusun oleh Bappeda dan disahkan DPRD. (Saafroedin Bahar, 2015:332)

b. Kebijakan Reorganisasi Pemerintahan Daerah

Sumatera Barat dalam pemerintah Azwar Anas pernah melakukan kebijakan reorganisasi pemerintahan daerah. Kebijakan-kebijakan tersebut ialah:

1) Diterapkannya posisi tiga pembantu gubernur.

Dimasa pemerintahan Azwar Anas di terapkannya posisi pembantu gubernur. Dalam melaksanakan hal tersebut Gubernur Sumatera Barat dibantu oleh tiga wakil gubernur, yang bertugas menjadi koordinator dalam melaksanakan kebijakan gubernur mengenai urusan wilayah dan bertanggung kepada gubernur terhadap wilayah yang di percayakan kepada mereka.

Ada tiga pembantu gubernur dan ke-tiganya menjadi koordinator wilayah tersebut. Karseno ditunjuk sebagai pembantu Gubernur Wilayah I yang meliputi daerah Pasaman, Kotamadya Bukittinggi, Agam, Kotamadya Payakumbuh, dan 50 Kota. Hasan Basri Durin pembantu Gubernur Wilayah II yang meliputi daerah Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Kotamadya Padang, Kotamadya Padang Panjang, dan tanah datar. Hasan Basri pembantu Gubernur Wilayah III yang meliputi daerah Kotamadya Solok, Kabupaten Solok, dan Sawahlunto/Sijunjung. (Wawancara 22 September 2020)

2) Jorong menjadi Desa

Jorong dijadikan desa diterapkan pada tahun 1983 melalui Perda Nomor 13 Tahun 1983. Dengan hal itu maka, jumlah desa di Sumatera Barat bertambah yang dari awalnya 543 menjadi 3.138 sebanyak jumlah jorong, dan ditambah 208 daerah kota atau kelurahan. Hal tersebut membuat Sumatera Barat menerima dana bantuan pemerintah enam kali lebih besar dari sebelumnya. Nilai subsidi pemerintah untuk setiap desa awalnya sebesar Rp 100.000 per tahun pada 1969 (tahun pertama pelita I), dan meningkat menjadi Rp 4,5 juta per tahun per desa pada tahun 1990. (Abrar Yusra, 2011:256)

Tabel 1 : Dana Pembangunan Pusat di Sumatera Barat Masa Pemerintahan Azwar Anas

Tahun	Jenis Bantuan (dalam miliaran Rupiah)						
	Bantuan Dati II	Inpres Dati II	APBN/ DIP	Inpres Bandes	IPJK	Inpres S.Kes	Inpres SD
1979-1984	5,971	18,919	352,162	16,283	10,630	4,070	59,818
1984/85	1,609	4,897	77,268	4,411	6,689	1,264	20,386
1985/86	1,664	5,585	87,474	4,994	7,011	1,298	22,937
1986/87	1,626	5,650	38,740	4,987	7,252	1,270	10,491
1987/88	1,689	5,739	20,024	4,986	9,232	2,037	2,436

Sumber: Bappeda Tk. I Sumbar.

c. Program Manunggal Sakato

Pada tahun 1984/1985 dibekukanlah suatu Program pembangunan desa terpadu yang disebut dengan 'Manunggal Sakato' berdasarkan Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 20/VIII/GSB/1984 Tanggal 7 Agustus 1984. Program tersebut

dibekukan untuk mewujudkan tekad dan tekad masyarakat berdasarkan pengalaman dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan desa di Sumatera Barat. Pola Manunggal Sakato adalah Program Pembangunan desa Terpadu di Sumatera Barat yang dilaksanakan secara sistematis. Pelaksanaan program tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Program tersebut dilaksanakan bersama Masyarakat dan Pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin. (Pemda Tingkat I Sumatera Barat, Direktorat Pembangunan Desa:22)

“Manunggal Sakato merupakan pencerminan dari semboyan masyarakat Minangkabau yaitu *"barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang"*. Dalam pelaksanaan program Manunggal Sakato peran *niniak mamak; alim ulama* dan *cadiak pandai* yang dikenal dengan *Tungku Tigo Sajarangan*, sangat dibutuhkan dalam menentukan dan merupakan kekuatan dalam menggerakkan swadaya masyarakat desa di Sumatera Barat. (Wawancara, 21 September 2020)

Pedoman dari program Manunggal Sakato ialah Pancasila, UUD 1945, GBHN, UU No. 5 Tahun 1974, dan UU No. 5 Tahun 1979. Program tersebut dimaksudkan untuk memadukan antara kebijaksanaan pemerintahan dengan keinginan dan kemauan masyarakat yang di gerakan oleh Tungku Tigo Sajarangan. Hal tersebut perwujudan dari pepatah Minangkabau *"Manitik dari ateh, mambusek dari bawah"*. Pada mulanya program Manunggal Sakato hanya menggunakan dana Inpres Bantuan Pembangunan Desa saja, setelah itu baru disempurnakan berdasarkan Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 16/INST/1985 yang dikeluarkan tanggal 14 Juni 1985. Intruksi tersebut tentang pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa dan proyek Lintas Sektor Masuk Desa yang dilaksanakan berdasarkan Program Manunggal Sakato. (Pemda Tingkat I Sumatera Barat, Direktorat Pembangunan Desa:23)

Tujuan dari Program Manunggal Sakato yaitu meletakkan dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Nasional yang sehat dan kuat dengan meningkatkan perkembangan desa dari desa Swadaya ke desa Swarkarya dan desa Swasembada dan menuju desa Pancasila. Meningkatnya partisipasi masyarakat yang dikerahkan dalam pembangunan Desa. Hal tersebut membuat masyarakat merasakan bahwasanya pembangunan yang dibangun bersama-sama dengan sistem gotong royong adalah milik masyarakat sendiri

d. Pembangunan Sosial Budaya

Sumatera Barat di masa pemerintahan Gubernur Azwar Anas dalam menyelenggarakan beberapak program, pemda memercayakan program tersebut kepada komunitas atau tokoh yang berpengalaman dan profesional di luar pemerintahan daripada memilih orang yang dari birokrasi. Hal tersebut dilakukan demi sebuah kualitas dan efisiensi. Beberapa kebijakan pemda yang menggunakan metode tersebut ialah.

1) Membuat dan Menyelenggarakan Pekan Budaya Sumatera Barat.

Pekan Budaya Sumatera Barat merupakan acara sebagai perwujudan dan keinginan untuk:

- a) Menggali sebuah khazanah kebudayaan rakyat.
- b) Melihatkan kekayaan seni budaya Minangkabau.

c) Melestarikan dan memelihara nilai-nilai tradisional Minangkabau.

2) Medan Nan Bapaneh

Medan Nan Bapaneh merupakan suatu program dari pembangunan sosial budaya di masa Azwar Anas. Manfaatnya Seperti untuk melatih, mengembangkan, dan memelihara kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian. Bahkan direncanakan Medan Nan Bapaneh akan dibangun di setiap kecamatan di Sumatera Barat. contohnya Medan Nan Bapaneh seperti di Kecamatan Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota yang sekarang dijadikan Taman Chairil Anwar.

3) MTQ XIII/1983

Tahun 1983 ditunjuklah Sumatera Barat untuk menyelenggarakan event nasional yaitu MTQ Nasional XIII. MTQ Nasional merupakan festival keagamaan yang berskala Nasional yang diikuti oleh berjuta-juta rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan Program P4. MTQ Nasional pertama kali diadakan tahun 1968 di Ujung Pandang, dan berlanjut hingga tahun 1983 Sumatera Barat menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional XIII. (Departemen Perhubungan Republik Indonesia: Perangko seri MTQ Nasional XIII)

Pelaksanaan MTQ Nasioanl XIII Sangatlah meriah dan sukses, Event Nasional tersebut membuat para perantau Minang banyak yang pulang kampung untuk meramaikan Event tersebut. Ada yang bilang bahwasanya MTQ XIII merupakan reuni pertama orang minang yang berada di kampung dan perantauan. Bahkan sejak berlangsungnya acara MTQ tersebut hawa dari trauma PRRI yang membuat kehidupan masyarakat Sumatera Barat terasa pengap mulai menghilang. Bukan hanya Sumatera Barat mempunyai Gelanggang Olahraga (GOR) dari MTQ Nasional, tetapi Dana yang berlebih dalam pelaksanaan MTQ Nasional XIII juga dimanfaatkan untuk pembangunan seperti membangun stadion olahraga tertutup, membangun Sekolah Tinggi Ilmu Al Quran, dan pembangunan kolam renang. Dan keuntungan ekonomi dalam berdagang karena Sumatera Barat dikunjungi oleh Provinsi-provinsi lain yang ikut serta. (Wawancara 22 September 2020)

Kesuksesan MTQ Nasional XIII masih diingat sampai sekarang, bahkan tahun 2020 Sumatera Barat dipercaya kembali menjadi Tuan MTQ Nasional yang ke-28 dan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 Irwan Prayitno ingin mengulang kesuksesan MTQ XIII 1983. Irwan Prayitno juga mengatakan dan manyanjung penyelenggaraan MTQ Nasional XIII 1983. (langgam.id. 1 juli 2019|10:58 WIB)

“Atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Sumatera Barat mengucapkan terima kasih kepada bapak Azwar Anas yang sukses besar menjadi penyelenggara MTQ Nasional XIII 1983 dan menjadi penyelenggara terbaik dalam menyelenggarakan MTQ Nasional.

Bangkitnya Harga Diri Masyarakat Daerah Sumatera Barat

Menurut Safrodin Bahar, untuk melihat perubahan orang minang dapat dilihat dari batasan sebelum dan sesudah. “Sebelum” adalah Sebelum kemerdekaan, “Sesudah” adalah kurun Kotomporer yaitu tahun 1970-an dan jarak 30 tahun antara “Sebelum dan Sesudah tersebut secara sosiologis orang minang dikatakan berada di zaman “pancaroba”. Dalam kurun 30 tahun tersebut ada masanya masyarakat Sumatera Barat merasakan berada di puncak ‘kejayaan’ karena peranan mereka dalam kepemimpinan bangsa Indonesia yang jauh

lebih banyak dari daerah lain. Tapi ada juga masanya mereka ‘terpaksa’ menyembunyikan identitasnya dengan mengganti nama, akibat yang ditimbulkan PRRI. Sesudah mengalami Krisis besar-besaran (sosial politik) mulai tahun 1966 (orde baru) orang sumatera barat dapat bangkit kembali.

Menurut Taufik Abdullah, hal tersebut berawal dari strategi memulihkan harga diri’ yang cukup berhasil dijalankan oleh gubernur harun zain (1966-1977) dan menjadikan sumbar bagian terdepan dari Pemerintahan Orde baru. Dan Puncak dari proses tersebut ialah ketiga sumatera barat dibawah kepemimpinan Gubernur Azwar anas, yang mana Sumatera Barat menjadi Provinsi Ketiga yang mendapatkan Parasamya Purnakarya Nugraha dari presiden soeharto.(Mestika Zed, 1998:284)

a. Anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 1979. Sebagai penghargaan atas hasil karya terbaik dalam pelaksanaan Pelita III Sumatera Barat di Anugerahi Penghargaan Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha melalui Petikan Presiden Republik Indonesia Nomor049/TK/ Tahun 1984. Piagam Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1984 (Petikan Presiden Republik Indonesia Nomor049/TK/ Tahun 1984).

Penyerahan Piagam atau Panji Parasamya Purnakarya Nugraha diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Agustus 1984 di GOR Haji Agus Salim. Pada saat itu suasana di Sumatera Barat terkhususnya daerah Kota Padang sangat meriah dan hal tersebut bisa dibilang langka (Wawancara 30 September 2020). Peanugerahan Provinsi terbaik dalam pelaksanaan pembangunan saat Pelita III bukan hanya ditanggapi sebagai prestasi ekonomi, tetapi lebih di titik beratkan sebagai prestasi sosial budaya. Menurut Syafril Kahar hal tersebut menunjuk kepada kiasan Minangkabau yaitu “Batang Tarandam Telah Bangkit” yang mana menunjuk pulihnya harga diri dan kehormatan kaum.(Saaфроedin Bahar, 2015:337)

b. Diperhatika Oleh Pusat

Pada tahun 1977 sampai 1988 dimasa Azwar Anas menjabat menjadi Gubernur Sumatera Barat, merupakan puncak pulihnya hubungan pusat dengan daerah Sumatera Barat. Dikarenakan Sumatera Barat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan pusat, seperti menjadi tuan rumah dari MTQ Nasional XI, Sering di kunjungi oleh Presiden dan penjabat-penjabat dari pusat, serta menerima penghargaan parasamya Purnakarya Nugraha sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan PELITA III.

1) Pekan Penghijauan Nasional XXII

Pekan Penghijauan Nasional XXII diadakan di Kenegarian Aripan Kecamatan X Singkarak Koto,Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Acara tersebut di adakan tanggal 20-23 Desember 1982 yang dihadiri oleh Presiden Soeharto, menteri, dan wakil-wakil tani dari Provinsi yang ada di Indonesia. Dan ada sesuatu hal yang membuat Pekan Penghijaun tersebut sangat istimewa, karena saat itu lah gagasan tentang munculnya *Gebu Minang*. *Gebu Minang* merupakan gerakan pengumpulan atau penghimpunan dana dari para perantau untuk

membantu pembangunan Sumatera Barat. Gerakan tersebut dilakukan secara terorganisasi yang mana terinspirasi dari perkataan Presiden Soeharto tentang para perantau menyumbang seribu rupiah. (Erniwati Dkk, 2017:134-135)

2) Diresmikannya beberapa Proyek di Sumatera Barat.

Dimasa pemerintahan Azwar Anas, Ada beberapa Proyek yang diresmikan oleh Presiden Soeharto, seperti: *Pertama*, Peresmian Pabrik Semen Padang II Sumatera Barat tanggal 18 April 1980. *Kedua*, Peresmian penggunaan irigasi dan pompa Sungai Dareh di Sitiung, Sumatera Barat tanggal 24 April 1982. *Ketiga*, Peresmian Pusat Lisrtrik Tenaga Gas di Pauh Limo, dan meresmikan beberapa Gardu Induk dan Jaringan Transmisi di Maninjau-Padang, serta peresmian Jaringan Distribusi Listrik di Sumatera Barat tanggal 24 Mei 1983. Keempat, peresmian PLTA Maninjau dan peresmian Pabrik Semen Indarung III A PT.Semen Padang di Sumatera Barat tanggal 28-29 Desember 1983. Dan di akhir Azwar Anas menjabat menjadi Gubernur Sumatera Barat, Presiden Soeharto meresmikan proyek pengairan Batang Kenaikan, Batang Kapar, Batang Alin, Batang Tinggiran.

3) MTQ Nasional XII Dan Pekan Budaya.

4) Sumatera Barat menjadi Provinsi Terbaik saat pelaksanaan Pelita III dan merupakan satu-satunya daerah di luar Pulau Jawa yang mendapatkan Anugerah Parasamya Purnakarya Nugraha.

Diperiode awal kemerdekaan Putra daerah Minangkabau dan Sumatera Barat dianggap pionir bagi kelahiran negara kebangsaan Indonesia, Peran orang Minang sangat menonjol, empat dari pendiri Republik tiga adalah orang Minang. Penggagas sumpah pemuda adalah orang Minang. Pertengahan Abad 20 pun, prestasi masyarakat Sumatera Barat dalam intelektual Nasional sangat menonjol karena “lebih dari 3 persen elite nasional berasal dari Sumatera Barat, 12 persen menteri-menteri Kabinet pada daswarsa pertama kemerdekaan Indonesia juga berasal dari Sumatera Barat. Dan 9 dari 15 penulis utama Balai Pustaka merupakan putra Sumatera Barat. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah kebanggaan karena memegang posisi istimewa dalam Nasional. Karena tampil dan berperan penting bagi nasional. (Mestika.Zed, 1998:159)

Setelah meletusnya PRRI, peran-peran kepeloporan tersebut dianggap sudah jauh merosot. Akan tetapi setelah PKI ditumpas dan Rezim Orde Baru mulai memimpin di Indonesia, mulai muncul sejumlah tokoh Minang, seperti Emil Salim dan Alfian yang ikut menjadi tim arsitek pembangunan ekonomi maupun politik di masa awal Orde Baru. Setelah itu muncullah tokoh-tokoh Sumatera Barat dalam panggung Nasional seperti budayawan Muchtar Naim, Harun Zain, Januar Muin, Azwar Anas, Hasan Basri Durin. Menurut Taufik Abdullah:

“Sumatera Barat sewaktu PRRI luar biasa penghinaannya. Saya bisa mengatakan begini karena saya melihat supir yang sangat takut tentara, saya pergi ke kampung saya nasehat yang diberikan kepada saya ialah tertib dan sopan kepada tentara, luar biasa penghinaan bagi Sumatera Barat saat itu. Bahkan bahasa minang di tulis dikoran sudah di campuri bahasa jawa. Jadi ada krisis keminangan dari sudut kebudayaan. Setelah masuk Orde Baru Sumatera Barat termasuk Provinsi yang di senangangi pak Harto. Setiap kabinet minimal ada tiga orang minang jadi menteri. Setiap Gubernur yang habis

menjabat pasti akan selalu menjadi menteri di masa Orde Baru”. Sebut saja Harun Zain, Azwar Anas, dan Hasan Basri Durin. (Minang Diaspora Network: 11 September 2020)

Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Sumatera Barat juga berefek positif terhadap cara pikir masyarakat Sumatera Barat terhadap Tentara atau ABRI. Pada tahun 1960-an masyarakat Sumatera Barat mempunyai rasa trauma terhadap Tentara APRI yang berhasil menumpas PRRI pada waktu tersebut. Anak yang lahir pada tahun 1960-an selalu di beri stigma negatif yang menakutkan tentang Tentara oleh Orang Tuanya, Contohnya orang tua menyuruh anaknya sembunyi kalau ada tentara, dan jangan dekat-dekat dengan tentara. Pandangan tentang tentara berubah karena Program TNI-AMD yang dilaksanakan Tahun 1980 dan peran Kodam/17 Agustus dalam membantu masyarakat untuk melaksanakan Pembangunan Manunggal Sakato, hal tersebut dianggap oleh masyarakat bahwasanya ABRI itu merakyat. Bahkan masyarakat merasa dekat dengan ABRI sampai ada beberapa masyarakat yang memanggil ABRI dengan Babinsa. (Wawancara 30 September 2020)

Dalam Program Manunggal Sakato partisipasi masyarakat dikerahkan dalam pembangunan Desa. Hal tersebut membuat masyarakat merasakan bahwasanya pembangunan yang dibangun bersama-sama dengan sistem gotong royong adalah milik masyarakat sendiri. Mochtar Naim pernah berpendapat bahwasanya:

“Masyarakat Sumatera Barat setelah PRRI ada yang tidak bisa bangki-bangkit lagi. Apatis, tidak mau ngomong, dan masa bodoh. Karena orang Minang tidak suka kalah. Pedih betul menerima kekalahan tersebut”.

Setelah PRRI masyarakat Sumatera Barat bersikap Apatis, tidak mau ngomong dan bersikap bodoh amat. Tetapi setelah masuknya Orde Baru dan Sumatera Barat dipimpin oleh Azwar Anas sikap apatis dan bodoh amat yang terjadi setelah PRRI mulai hilang. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi masyarakat Sumatera Barat dalam Program Manunggal Sakato. Upaya untuk mengembalikan harga diri orang-orang Minang selama ini memang bukan tanpa hasil. Tetapi penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha yang di menangkan oleh Sumatera Barat tahun 1984, dan sebagai daerah pertama di luar Pulau Jawa yang mendapatkannya. Hal tersebut dinilai sebagai keberhasilan Sumatera Barat dalam pembangunan. Harun Zain berpendapat “hal Ini memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan Sosial Politik masyarakat Minangkabau.” (Majalah Tempo.. Edisi:12 Juli 1986) Menurut Nurila istri dari Hasan Basri Dt Bagindo Rajo yang merupakan komanda pleton PRRI:

“Selama saya hidup dari, dari Indonesia Merdeka sampai sekarang, di zaman pemerintahan Soeharto Sumatera Barat aman, nyaman, dan tidak ada permasalahan dengan pusat. Bahkan pembangunan Sumatera Barat di zaman Soeharto lancar. Bahkan diantara Presiden Indonesia yang lain di zaman Soeharto lah yang paling tentram”,Ucap Nurila. (Wawancara 12 Oktober 2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya tentang pembahasan skripsi yang berjudul ‘Sumatera Barat pasca PRRI: Mambangkik Batang Tarandam dimasa Pemerintahan Gubernur Azwar Anas tahun 1977-1988’, dapat disimpulkan bahwa Sumatera Barat setelah PRRI mengalami trauma seperti guncangan kultural dan krisis identitas kesukuan sebagai orang Minang. Setelah PRRI Sumatera Barat mulai melakukan pasifikasi atau normalisasi daerah Sumatera Barat. Yang berawal dari pemerintahan Gubernur Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa tahun 1958-1965, dan munculnya Orde Baru yang saat itu Sumatera Barat dipimpin oleh Harun Zain tahun 1967-1977 dengan strategi harga dirinya. Kepemimpinan Azwar Anas sebagai Gubernur Sumatera Barat tahun 1977-1987 melakukan program atau kebijakan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik di Sumatera Barat dengan tujuan untuk mambangkik batang tarandam dan kepercayaan diri masyarakat Sumatera Barat.

Sumatera Barat di masa kepemimpinan Azwar Anas menjalankan beberapa program atau kebijakan seperti menyusun pola dasar pembangunan Sumatera Barat yang dinamakan Sapta Karya Pembangunan Sumatera Barat yang menjadi landasan pembangunan fisik dan non-fisik di Sumatera Barat. Beliau juga melakukan Reorganisasi Pemerintahan daerah dengan mengubah Jorong menjadi Desa dan membentuk sistem tiga pembantu Gubernur. Pembangunan desa di Sumatera Barat di lakukan dengan pola pembangunan desa terpadu yang dinamakan Manunggal Sakato yang di dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat Sumatera barat, dan beliau juga melakukan pembangunan sosial budaya seperti melaksanakan pekan budaya dan membangun medan nan bapaneh untuk menggali khazanah budaya Minangkabau, serta menjadi pelaksana MTQ Nasional yang ketiga belas.

Kebangkitan Sumatera Barat dicanangkan oleh Harun Zain tahun 1967-1977 dan mencapai puncaknya saat Azwar Anas menjabat menjadi Gubernur Sumatera Barat. Sumatera Barat tahun 1983 menjadi pelaksana MTQ Nasional ketiga belas yang merupakan event nasional pertama yang di laksanakan Sumatera Barat setelah pergolakan PRRI. Tahun 1984 Sumatera Barat menjadi satu-satunya Provinsi di luar Pulau Jawa yang memenangkan penghargaan Parasamy Purnakarya Nugraha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrar Yusra. 2011 Azwar Anas: Teladan dari ranah minang. Jakarta: Kompas.

Erniwati, Azmi Fitriasia Dkk. Hasan Basri: Perjalanan Birokrat Sejati

Hasris Chaniago, Khairul Jasmi. Brigadir Jenderal Polisi Kaharoeddin Datuk Rangkayo Basa: Gubernur Di Tengah Pergolakan

Louis Gottschalk, 1986. Mengerti Sejarah, Jakarta, Ui Press.

Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Pemda Tingkat I Sumatera Barat. 1984 Petunjuk Pelaksanaan Manunggal Sakato (Pembangunan Desa Terpadu) Di Sumatera Barat. Direktorat Pembangunan Desa.

Saafroeddin Bahar. Etnik, Elite, Dan Integrasi Nasional Minangkabau 1945-1984.

Dokumen

Arsip Keputusan Presiden Indonesia Nomor 122/M. Tahun 1977

Arsip Keputusan Presiden Indonesia Nomor 049/TK/ Tahun 1984

Internet

Langgam.id. MTQ 2020 DI Sumbar Diharapkan Sesukses MTQ Nasional 1983, Masa Gubernur Azwar Anas. awnin, 1 juli 2019|

Minang Diaspora Network. Pernyataan Prof. Dr. Taufik Abdullah Sejarawan LIPI.. 11 September 2020

Minang Diaspora Network. Politisi Minang: Dulu, sekarang dan yang akan datang. 14 Oktober 2020

Skripsi

Skripsi Arfan Shandy,2008. Dengan judul *Harun Zain: Strategi Mambangkik Batang Tarandam Dalam Kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat.*

Wawancara

Wawancara dengan ABD. Rasyid. Dt. Putih. Senin, 21 September 2020 pukul 13.00 di Pesisir Selatan.

Wawancara dengan Hermaldi Dt. Rajo Indo Laut. Selasa, 22 September 2020 pukul 14.00 di Pesisir Selatan

Wawancara dengan Baharuddin. Rabu.30 September 2020. Jam 14.30 di Padang.

Wawancara dengan Nurila, istri dari Hasan Basri Dt Bagindo Rajo yang merupakan komanda pleton PRRI. Senin, 12 Oktober 2020 pukul 14.00 di Padang.